LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 55 TAHUN 2008 TANGGAL: 1 DESEMBER 2008

# TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD SERTA PENYAMPAIANNYA

#### 1. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan bendahara pengeluaran PPKD adalah untuk melakukan pengeluaran/belanja PPKD dan pengeluaran pembiayaan. Dalam proses ini bendahara pengeluaran PPKD menyusun dokumen SPP-LS PPKD.

SPP-LS PPKD sebagai alat pengajuan dana atas belanja-belanja PPKD seperti belanja hibah, belanja bunga dan belanja tak terduga. SPP-LS PPKD ini disusun oleh bendahara pengeluaran PPKD

Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-LS, selain dari dokumen SPP-LS itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain:

- a) Salinan SPD
- b) Lampiran lain yang diperlukan

Setelah itu bendahara pengeluaran PPKD mengisi dokumen SPP LS PPKD yang telah disiapkan. Disamping membuat SPP, bendahara pengeluaran PPKD juga membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara.

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... REGISTER SPP/SPM/SP2D BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

Nomor	Jenis Belanja	SPP		S	SPM		P2D	Uraian	Jumlah	Keterangan
Nonioi		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Olalali	Juillan	Neterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

,Tanggal Bendahara Pengeluaran PPKD
(Tanda Tangan)
( <u>Nama Jelas</u> ) NIP.

- 1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang bersangkutan
- 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 3. Kolom 2 diisi dengan jenis belanja yang diajukan
- 4. Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP
- 5. Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP yang diajukan
- 6. Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait pengajuan SPP pada kolom sebelumnya
- 7. Kolom 6 diisi dengan Nomor SPM yang diterbitkan
- 8. Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan penerbitan SPM pada kolom sebelumnya
- 9. Kolom 8 diisi dengan Nomor SP2D yang diterbitkan
- 10. Kolom 9 diisi dengan Uraian Pengajuan
- 11. Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan
- 12. Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan

#### 2. PEMBUKUAN BELANJA PPKD

Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakan proses pencatatan SP2D LS PPKD ke dalam BKU Pengeluaran dan Buku Pembantu yang terkait. Pembukuan dimulai ketika bendahara pengeluaran PPKD menerima SP2D LS PPKD dari BUD/Kuasa BUD

Dokumen-Dokumen yang digunakan dalam pembukuan bendahara pengeluaran PPKD adalah:

- 1. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran PPKD
- 2. Buku Pembantu BKU Bendahara Pengeluaran PPKD yang terdiri dari :
  - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Bendahara Pengeluaran PPKD

Contoh dokumen-dokumen pembukuan adalah sebagai berikut:

## PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

No	Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Mengetahui	, Tanggal			
PPKD	Bendahara Pengeluaran PPKI			
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)			
( <u>Nama jelas</u> )	( <u>Nama jelas</u> )			
NIP	NIP			

- 1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang bersangkutan
- 2. Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat
- 3. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi
- 4. Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi
- 5. Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. Kolom ini diisi hanya untuk transaksi belanja
- 6. Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan.
- 7. Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran
- 8. Kolom saldo diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.
- 9. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan PPKD disertai nama jelas.\*

<sup>\*</sup> Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

Kode Rekening	:
Nama Rekening	:
Jumlah Anggaran	: Rp

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS

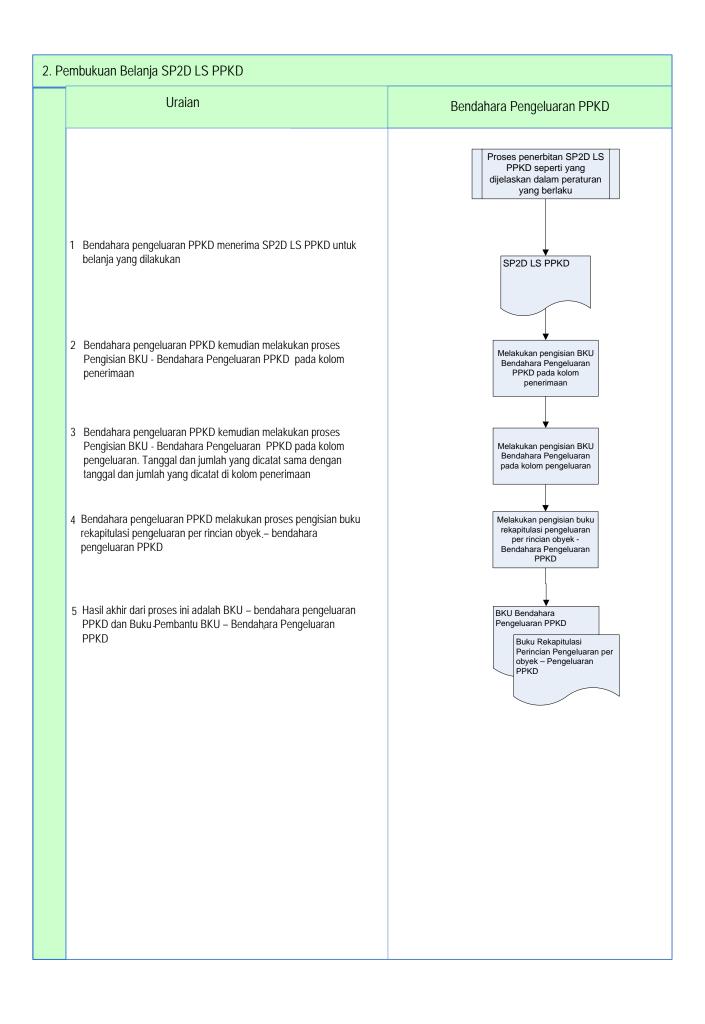
Mengetahui,	, Tanggal
PPKD	Bendahara Pengeluaran PPKD
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
( <u>Nama jelas</u> )	( <u>Nama jelas</u> )
NIP.	NIP.

- 1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, kode rekening, nama rekening, jumlah anggaran dan tahun anggaran
- 2. Kolom Tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran
- 3. Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara Pengeluaran PPKD
- 4. Kolom uraian diisi dengan uraian belanja
- 5. Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja menggunakan SPP LS
- 6. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan PPKD disertai nama jelas.\*
- \* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD

Langkah-langkah dalam membukukan SP2D LS PPKD yang diterima adalah sebagai berikut:

- 1. Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD menggunakan BKU Bendahara Pengeluaran PPKD dan Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Obyek.
- 2. Terhadap SP2D LS PPKD yang diterima oleh bendahara pengeluaran PPKD, transaksi tersebut di catat di BKU Bendahara Pengeluaran PPKD pada kolom penerimaan. Nilai yang dicatat sebesar jumlah kotor (gross). Kemudian bendahara pengeluaran PPKD mencatat di BKU- bendahra pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang dicatat sebelumnya di kolom penerimaan
- 3. Terhadap semua belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKD selain dicatat pada BKU- bendahara pengeluaran PPKD, belanja-belanja tersebut juga perlu dicatat di Buku Pembantu rincian per obyek.

Berikut adalah Bagan Alir yang menggambarkan proses Pembukuan SP2D LS PPKD



#### 3. PERTANGGUNGJAWABAN

Bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalam tanggung jawabnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Pertangungjawaban disampaikan kepada PPKD. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut, dokumen yang disampaikan adalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Dokumen SPJ tersebut dilampirkan dengan:

- 1. Buku Kas Umum (BKU) bendahara pengeluaran PPKD
- 2. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek bendahara pengeluaran PPKD yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud

Disamping laporan pertanggungjawaban diatas Bendahara Pengeluaran PPKD membuat Register untuk SPP yang diajukan serta SPM dan SP2D yang telah diterbitkan.

Contoh Dokumen Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

### PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...... LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

Bendahara Pengeluaran PPKD :
Tahun Anggaran :
Bulan :

(dalam rupiah)

		Jumlah Anggaran	S	PJ - LS PI	(uaiaiii rupiaii)	
Kode Rekening	Uraian		s.d. Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3-6)
JUMLAH						
	Penerimaan					
	- SP2D					
	- Potongan Pajak					
	a. PPN					
	b. PPh-21					
	c. PPh-22					
	d. PPh-23					
	- Lain-lain					
	Jumlah Penerimaan					
	Pengeluaran					
	- SPJ (LS )					
	- Peyetoran Pajak					
	a. PPN					
	b. PPh-21					
	c. PPh-22					
	d. PPh-23					
	- Lain-lain					
	Jumlah Pengeluaran					
	Saldo Kas					

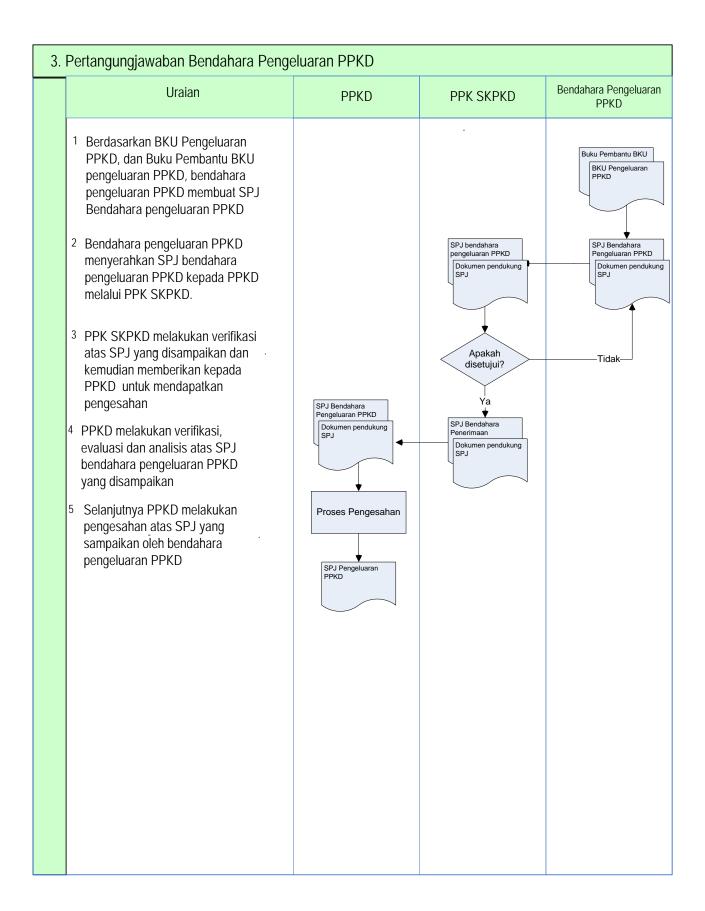
Mongotohui	, tanggal		
Mengetahui  PPKD	Bendahara Pengeluaran PPKD		
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)		
( <u>Nama Jelas)</u> NIP	(Nama Jelas) NIP		

- 1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang bersangkutan, nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, nama bendahara pengeluaran, tahun anggaran dan bulan.
- 2. Kolom 1 diisi dengan kode rekening
- 3. Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening
- 4. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening
- 5. Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan lalu
- 6. Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini
- 7. Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai dengan bulan ini
- 8. Kolom 7 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS sampai dengan bulan ini.

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara PPKD adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan BKU-bendahara PPKD dan buku pembantu BKU lainnya, Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- 2) Dokumen SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian di berikan ke PPK SKPKD untuk dilakukan verifikasi
- 3) Setelah mendapatkan verifikasi, dokumen SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian diberikan ke PPKD untuk kemudian mendapatkan pengesahan.
- 4) Apabila disetujui, PPKD mengesahkan SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kemudian memberikan dokumen SPJ yang sudah ditandatangani tersebut kepada bendahara pengeluaran PPKD

Berikut adalah Bagan Alir yang menggambarkan proses pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD.



**MENTERI DALAM NEGERI,** 

ttd

H. MARDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

**PERWIRA**